

# KONSEP SEKOLAH DAMAI: HARMONISASI PROFIL PELAJAR PANCASILA DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

Anif Istianah<sup>1)</sup>, Bunyamin Maftuh<sup>2)</sup>, Elly Malihah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1</sup>Email: [anif.istianah88@upi.edu](mailto:anif.istianah88@upi.edu)

<sup>2</sup>[bunyaminmaftuh@upi.edu](mailto:bunyaminmaftuh@upi.edu)

<sup>3</sup>[ellyms@upi.edu](mailto:ellyms@upi.edu)

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 20 Mei 2023

Revisi, 4 Juni 2023

Diterima, 10 Agustus 2023

Publish, 15 September 2023

### Kata Kunci :

Sekolah damai  
profil pelajar pancasila  
kurikulum Merdeka

## ABSTRAK

Saat ini pendidikan berpusat pada konsep Sekolah Damai yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, inklusif dan damai. Artikel ini menjelaskan pentingnya mengintegrasikan kurikulum terbuka Pancasila, kurikulum dan profil siswa ke dalam konsep Sekolah Damai. Penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka. Hasil kajian pustaka mendeskripsikan bahwa untuk menjawab tantangan yang dihadirkan dengan menyelaraskan Kebebasan Belajar, Kurikulum Kebebasan, dan profil pelajar Pancasila, seperti menyeimbangkan praktik kebebasan akademik dengan keberlanjutan dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Manfaat yang mungkin diperoleh dari penerapan konsep Sekolah Damai, seperti: menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan inovatif serta mendorong keterlibatan siswa. Memberikan contoh *best practice* sekolah yang berhasil mengintegrasikan Pembelajaran Bebas, Kurikulum Mandiri dan Profil Pelajar Pancasila dengan tujuan mewujudkan sekolah damai. Metode untuk menulis artikel ini analisis literatur dan penelitian yang relevan untuk lebih memahami topik yang dibahas. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya hubungan antara konsep Sekolah Damai: Harmonisasi kurikulum dan profil Pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum *Borderless Learning* mengarah pada upaya menciptakan lingkungan belajar *kooperatif* yang damai, inklusif, dan lintas batas. Dalam konteks integrasi antar kurikulum, profil Pelajar Pancasila, dan pemahaman konteks global berperan penting dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang lebih luas dan adaptif, generasi yang menjaga perdamaian dan keamanan.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



### Corresponding Author:

Anif Istianah

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: : [anif.istianah88@upi.edu](mailto:anif.istianah88@upi.edu)

## 1. PENDAHULUAN

Perwujudan masyarakat yang damai sudah bisa dimulai di sekolah. Sebagai panutan bagi masyarakat, warga sekolah memiliki kesempatan untuk mengembangkan budaya damai yang dapat diinternalisasi dan diterapkan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Budaya sekolah dapat diartikan sebagai kumpulan nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan tertulis dan tidak tertulis yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah sebagai cara berpikir, bertindak, dan belajar siswa sekolah.

Kualitas sekolah meliputi nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yg membentuk cara siswa, guru, dan administrator sekolah berinteraksi. Lingkungan sekolah memilih parameter perilaku yg dapat diterima buat semua pemangku kepentingan serta memutuskan tanggung jawab individu serta kelembagaan buat keselamatan sekolah (Welsh, 2000). Lingkungan sekolah, yang didefinisikan menjadi kualitas hubungan di dalam sekolah, artinya konsep multidimensi yg meliputi aspek interpersonal, organisasi, dan pedagogis (Loukas, Suzuki & Horton, 2006). Lingkungan sekolah berkembang asal kecenderungan persepsi siswa, mensugesti semua peserta didik serta dipengaruhi oleh perilaku mereka. Sekolah Perdamaian ialah tempat yang mempromosikan serta mendukung individu yg hening, hubungan yg hening, komunitas sekolah yg hening, dan konsep perdamaian secara umum. Lingkungan sekolah yang positif adalah bagian penting dari sekolah yang sukses dan oleh sebab itu seringkali sebagai tujuan inisiatif seluruh sekolah (brand, Felner, Shim, Seitsinger & Dumas, 2003). Sekolah formal dirancang dan diukur untuk membentuk watak dan sikap peserta didik serta merupakan wahana pengembangan nilai-nilai kebhinnekaan dan persatuan dalam Pancasila. Dalam konteks ini, penting untuk membahas konsep Sekolah Damai yang menggabungkan kurikulum bebas, harmonisasi kurikulum dan profil pelajar Pancasila.

Penerapan profil pelajar Pancasila dalam menciptakan sekolah damai sangat relevan dengan penerapan kurikulum merdeka belajar. Profil pelajar Pancasila mengacu pada pendidikan karakter yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dan minat mereka secara mandiri.

Ada upaya implementasi Kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong kreativitas, inovasi, dan kebebasan belajar, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan konsep tersebut dengan Kurikulum yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan Profil Pelajar Pancasila agar siswa mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari.

mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara inklusif, kolaboratif, dan kreatif. Terwujudnya budaya damai merupakan prasyarat penting bagi tercapainya tujuan dasar pendidikan perdamaian.

Pendidikan menciptakan perdamaian adalah suatu proses dimana nilai, pengetahuan dan sikap, keterampilan dan pola perilaku dikembangkan agar seseorang dapat hidup harmonis dengan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan sekolah (Salomon, 2002). Inti dari pendidikan perdamaian adalah pengembangan keterampilan, yang tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kepribadian tanpa kekerasan dan memperoleh keterampilan resolusi konflik. Contoh terbaik adalah kurikulum sekolah, pencegahan kekerasan, mediasi teman sebaya dan resolusi konflik (Deutsch, 1993). Kembangkan diskusi tentang wacana pendidikan perdamaian di sekolah dan bimbing guru untuk berpikir, bertindak dalam menanggapi kesalahan dan konflik siswa (Cavanagh, 2009). Tujuan dari program pendidikan perdamaian adalah untuk mendorong keterampilan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku damai, untuk mendorong siswa, termasuk anak-anak, untuk berpikir positif tentang masalah sosial atau emosional, dan untuk mengembangkan sikap positif terhadap koeksistensi keragaman dan penyelesaian masalah terjadi secara damai dalam kehidupan sekolah dan masyarakat (Mushaiqri, Ishak & Ismail, 2021). Sebagai landasan penting untuk membangun masyarakat yang rukun dan damai diantara banyak perbedaan. Sekolah berperan penting dalam

Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara Kurikulum Merdeka Belajar, sesuai Kurikulum, dan Profil Pelajar Pancasila dalam konsep Sekolah Damai. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana integrasi ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam implementasinya.

Integrasi keteladan guru sebagai pendidik yang cinta damai. Seorang pendidik memastikan ketenangan dalam proses pembelajaran, menyelesaikan konflik dengan cara *win-win*, dan mencegah konflik dengan mengajarkan toleransi siswa (Buchori, S., & Fakhri, N, 2022 ). Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya harmonisasi antara Kurikulum Merdeka Belajar, sesuai Kurikulum, dan Profil Pelajar Pancasila dalam konteks Konsep Sekolah Damai. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan, guru, dan stakeholder pendidikan lainnya dalam menerapkan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada perdamaian, keberlanjutan, dan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa model langkah yang dapat diambil untuk menerapkan profil pelajar Pancasila dalam menciptakan sekolah damai dengan menerapkan kurikulum merdeka

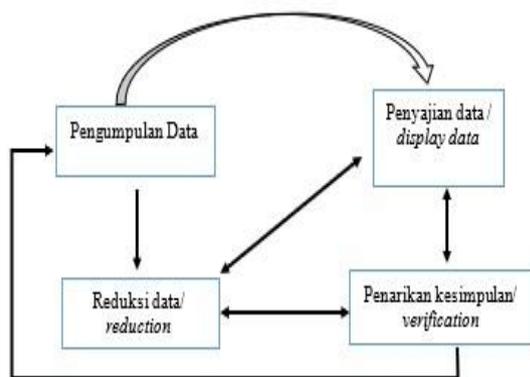


**Gambar 1.** Model langkah yang dapat diambil untuk menerapkan profil pelajar Pancasila dalam menciptakan sekolah damai dengan menerapkan kurikulum merdeka belajar

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang ditujukan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan konstruksi citra yang kompleks dan holistik, dibentuk oleh kata-kata yang melaporkan pandangan detail informan, dan dilakukan dalam lingkungan alami (Cresswell, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kajian sastra mengacu pada kajian teoritis dan referensi lain tentang nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data terkait jawaban atas rumusan masalah dilakukan dengan melihat berbagai referensi terkait prioritas penulisan yang diperoleh melalui buku, jurnal dan dokumen terkait baik cetak maupun online.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyajian data dan kesimpulan/verifikasi adapun visualisasi tersebut sebagai berikut:



**Gambar 2:** alur analisis data (Sugiyono, 2013; Faiz & Soleh; Faiz, Novthalia, et al., 2022)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan ruang lingkup menggambarkan beberapa konsep kunci yang terkait dengan strategi pendidikan perdamaian yang diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Pengamatan pertama adalah bahwa pendidikan perdamaian dapat diimplementasikan pada berbagai tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini jenjang pendidikan

yang mengintegrasikan pendidikan perdamaian ke dalam pembelajaran di sekolah adalah TK-TPA, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MT), Sekolah Dasar Islam (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pondok Pesantren. Hasil ini menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan kurikulum berbasis agama ke dalam proses pembelajarannya merupakan model sekolah yang cenderung menerapkan pendidikan perdamaian.

Pelaksanaan sekolah perdamaian memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam masyarakat, memiliki kecakapan hidup keterampilan sosial, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam masyarakat pluralistik, demokratis dan saling bergantung, di tingkat lokal, nasional dan regional maupun secara global. Untuk dapat mencapai tujuan di atas, maka perlu dikembangkan beberapa kompetensi yang dipupuk oleh ilmu sosial. James Banks (1990: 6) menyoroti beberapa kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain: (a) pengetahuan, (b) keterampilan, (c) sikap dan nilai, dan (d) praktik kewarganegaraan. Peserta didik perlu menguasai pengetahuan untuk membuat keputusan dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat sipil. Siswa harus memiliki meliputi keterampilan berpikir, keterampilan penelitian ilmu sosial, keterampilan akademik dan keterampilan kelompok. Mahasiswa adalah warga negara-negara juga harus mengembangkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan (demokrasi dan nilai kemanusiaan). seperti martabat dan kesetaraan orang, untuk tujuan membuat keputusan yang dipikirkan dengan baik dan mengambil tindakan sesuai dengan nilai-nilai ideal negara. Melalui praktik kewarganegaraan, peserta didik juga akan menerima kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang akan tumbuh pengetahuan yang lebih luas tentang politik dan mengajarkan keterampilan berguna untuk mempengaruhi organisasi sosial dan warga negara.

Dalam pelaksanaan sekolah perdamaian, hasil pembelajaran kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai kompetensi sosial yang diperlukan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang harmonis dan damai. Beberapa kompetensi yang dapat dipupuk oleh ilmu sosial dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

Kemampuan berpartisipasi aktif dalam masyarakat: Pembelajaran kewarganegaraan membantu peserta didik untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang aktif. Mereka akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat, serta cara-cara untuk terlibat dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti diskusi, debat, simulasi, atau proyek-proyek sosial, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat.

Keahlian hidup dan keterampilan sosial: Pembelajaran kewarganegaraan juga mengembangkan kecakapan hidup dan keterampilan sosial yang penting bagi peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka akan belajar tentang komunikasi efektif, kerjasama, negosiasi, resolusi konflik, empati, toleransi, dan menghormati perbedaan. Keterampilan ini akan membantu peserta didik untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, mengatasi perbedaan, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam berbagai situasi kehidupan.

Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam masyarakat pluralistik, demokratis, dan saling bergantung: Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan peserta didik tentang nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan saling bergantung dalam masyarakat. Mereka akan belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain, menghormati kebebasan berekspresi, menghargai keragaman budaya, agama, dan pandangan politik. Peserta didik akan diajarkan cara berkomunikasi secara efektif, memahami sudut pandang orang lain, dan mencapai kesepakatan melalui dialog dan musyawarah. Mereka juga akan belajar tentang pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Kesadaran global: Pembelajaran kewarganegaraan juga membantu peserta didik untuk memiliki pemahaman yang luas tentang isu-isu global dan memahami keterkaitan antara tindakan lokal dengan dampak global. Mereka akan belajar tentang isu-isu seperti perdamaian, keadilan sosial, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi global. Peserta didik akan diajarkan cara berpikir secara global, melihat perspektif yang berbeda, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap isu-isu global.

Pembahasan tentang Konsep Sekolah Damai menjadi pusat perhatian dalam pendidikan saat ini karena pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, inklusif, dan damai bagi para siswa. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan sosial peserta didik.

Secara khusus, konsep perdamaian yang perlu dicapai sekolah dalam pelaksanaan pendidikan perdamaian terbagi menjadi 3 tujuan utama: 1) menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian yang cinta damai dan mampu memahami perbedaan; 2) menjaga keharmonisan dalam masyarakat; 3) meminimalkan perilaku kekerasan.

Selanjutnya, yaitu strategi pendidikan kedamaian yang dilakukan oleh sekolah, secara garis besar dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Integrasi pendidikan kedamaian dalam kurikulum sekolah, dilakukan dengan cara:
  - (a) Pengembangan dan penerapan kurikulum yang berdasar pada nilai-nilai cinta damai. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar memperhatikan pentingnya keselarasan antara Kurikulum, Perkurikulum, dan Profil Pelajar

Pancasila. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengatur dan mengarahkan pembelajarannya sendiri, sementara Perkurikulum merujuk pada berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran di luar kelas yang mendukung pengembangan siswa secara holistik. Profil Pelajar Pancasila mengacu pada nilai-nilai dan sikap yang diharapkan dari siswa, yang mencakup semangat kebangsaan, cinta tanah air, persatuan, dan kesatuan. Pengintegrasian open *curriculum*, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila dalam konsep sekolah perdamaian sangat penting. Dengan menggunakan pendekatan holistik, pendidikan dapat membentuk kepribadian peserta didik secara menyeluruh. Hal ini melibatkan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, seperti rasa cinta tanah air, semangat kebersamaan, dan saling menghormati. Dalam konteks ini, sekolah harus menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihormati tanpa memandang perbedaan budaya, agama, atau latar belakang sosial.

- (b) Penanaman nilai-nilai kedamaian dalam misi sekolah.

Selain itu, pendidikan juga harus menumbuhkan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Siswa perlu diajarkan pentingnya kerjasama, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman. Mereka harus belajar bagaimana mengatasi konflik secara damai, memecahkan masalah secara konstruktif, dan menghargai perbedaan pendapat. Dalam konteks sekolah perdamaian, semua elemen kurikulum dan kegiatan di sekolah harus sejalan dan saling mendukung. Kurikulum harus memasukkan pembelajaran tentang perdamaian, konflik, dan penyelesaian masalah dalam konteks yang relevan bagi siswa. Perkurikulum harus menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kerjasama, toleransi, dan inklusi. Profil Pelajar Pancasila menjadi panduan untuk mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan damai.

- (c) Integrasi kurikulum berbasis perdamaian dalam berbagai kegiatan sekolah (kegiatan kurikuler/intrakurikuler, kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler) Integrasi kurikulum berbasis perdamaian dalam berbagai kegiatan sekolah mencerminkan pendekatan yang holistik untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, pemahaman antarbudaya, dan resolusi konflik di lingkungan pendidikan.
- (d) menerapkan pendidikan berbasis anti kekerasan khususnya *bullying* di sekolah. Membangun kesadaran: Sekolah harus membangun kesadaran yang kuat tentang pentingnya pencegahan *bullying*. Ini dapat dilakukan melalui seminar, ceramah, dan program pendidikan yang ditujukan untuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua. Tujuan utama adalah mengajarkan

mengenai konsekuensi negatif dari bullying serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait bullying. Kebijakan ini harus mencakup definisi bullying, konsekuensi bagi pelaku, serta prosedur penanganan dan pelaporan kasus bullying. Kebijakan tersebut harus didistribusikan kepada semua anggota sekolah dan dipatuhi dengan konsisten. Adanya pelatihan guru: Guru harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan meresponsnya dengan tepat. Mereka juga harus dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi kasus bullying dan membantu para korban. Pelatihan tersebut dapat mencakup strategi penanganan konflik, pengelolaan emosi, dan promosi hubungan sosial positif. Pendidikan empati dan pengembangan keterampilan sosial: Siswa harus diberikan pendidikan tentang empati dan pengembangan keterampilan sosial. Ini dapat melibatkan kegiatan seperti permainan peran, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif.

- (e) Melibatkan guru dalam penyusunan kurikulum berbasis pendidikan kedamaian.

Pengalaman langsung dalam melibatkan guru memiliki pengalaman langsung dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Mereka tahu bagaimana menghadapi konflik, membangun hubungan yang harmonis, dan mempromosikan pemahaman antarindividu. Melibatkan guru dalam penyusunan kurikulum memungkinkan mereka berbagi pengalaman dan wawasan mereka untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif.

Pemahaman siswa: Guru memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan minat siswa mereka. Dalam pendidikan kedamaian, penting untuk memahami konteks sosial dan emosional siswa, serta mempertimbangkan perbedaan individu dan kelompok. Guru dapat membantu merancang kurikulum yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

- 2) Pelaksanaan pendidikan perdamaian dalam proses pembelajaran dilakukan dengan:(a) Disiplin tanpa hukuman. (b) Kebiasaan pergi ke sekolah setiap hari. (c) Mendampingi siswa dengan pembinaan dan pendampingan. (d) Mengajarkan siswa untuk bersikap dan berperilaku tenang agar tidak mengganggu siswa lain saat belajar. (e) Metode pengajaran guru berfokus pada keteladanan, pelatihan yang berpusat pada siswa. (f) Guru menjadi guru perdamaian dengan menekankan penyelesaian konflik berdasarkan toleransi terhadap orang lain.
- 3) Pendidikan perdamaian dibangun dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik, misalnya: Pembelajaran sosial-emosional bagi siswa dan kebiasaan nilai – nilai Pancasila pengembangan pribadi
- 4) Pendidikan perdamaian dikembangkan melalui pemajuan hubungan sosial siswa, yang dilakukan

dengan:(a) Menanamkan nilai-nilai menghormati orang lain. (b) Menanamkan pola komunikasi berbasis perdamaian antar manusia, misalnya sapaan yang santun dan tutur kata yang santun.

- 5) Pendidikan perdamaian dilaksanakan di sekolah melalui dukungan sarana atau fasilitas sekolah yang kondusif, siswa merasa aman dan nyaman.
- 6) Mengintegrasikan pendidikan perdamaian melalui kerjasama sekolah dan pihak lain seperti orang tua/wali, komunitas/kelompok berbasis perdamaian, dan sekolah lain, dengan tujuan membangun toleransi terhadap keberagaman

Menanamkan perdamaian melalui pendidikan, yaitu 1) sistem pendidikan yang mendorong semua anak dan remaja untuk bersekolah penuh sebagai kewajiban, 2) rasa solidaritas berdasarkan tujuan bersama dan identitas bersama, 3) mengajarkan siswa proses penalaran yang konstruktif, 4) melatih siswa bernegosiasi secara integratif dan meningkatkan keterampilan mediasi teman sebaya dalam penyelesaian konflik interpersonal dan 5) menanamkan nilai-nilai yang menarik perhatian siswa terhadap keberlanjutan kebaikan bersama dalam masyarakat (Johnson & Johnson, 2005).

Dengan mengimplementasikan konsep sekolah damai, diharapkan siswa akan tumbuh menjadi individu yang memiliki sikap inklusif, toleran, dan mampu memecahkan konflik dengan cara yang damai. Mereka akan terampil dalam berkomunikasi dengan baik, menerima perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini pengertian konsep-konsep kunci Sekolah Damai:

- a) Budaya damai. Merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, budaya damai berarti seperangkat nilai, sikap, tindakan, dan gaya hidup yang menolak kekerasan dan mencegah konflik dengan mengatasi akar konflik untuk menyelesaikan masalah topik melalui dialog dan negosiasi, baik secara individu maupun kelompok. Budaya damai ini perlu diterapkan di sekolah tidak saja meningkatkan kemampuan aktor pendidikan mengatasi konflik secara nirkekerasan, tetapi juga menciptakan ruang dan lingkungan yang memadai untuk terhindar dari praktik diskriminasi dan intoleransi di sekolah.
- b) Kebijakan. Prinsip-prinsip tindakan atau rangkaian tindakan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diusulkan atau diadopsi pihak sekolah terkait penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kebijakan yang baik biasanya merujuk setidaknya pada tiga hal. Pertama, menyatakan hal-hal prinsip. Kedua, fokus pada tindakan, menyatakan apa yang harus dilakukan dan oleh siapa. Ketiga, berisi pernyataan otoritatif yang dibuat oleh orang atau badan yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Kebijakan pada umumnya dibedakan dengan hukum (*law*) dan peraturan

- (*regulation*). Peraturan tersebut harus adaptif dan praktis.
- c) Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai bahkan memperluas hak-hak dasar warga negara yang dijamin Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang, terutama terhadap kelompok yang tidak disukai. Toleransi yang didasarkan atas dasar perbedaan agama dan keyakinan dalam buku ini disebut sebagai “toleransi sosial-keagamaan”.
  - d) Intoleransi. Sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, melawan, atau menyangkal hak-hak dasar warga negara yang dijamin Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang, terutama terhadap kelompok yang tidak disukai yang mengatasnamakan agama, keyakinan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, atau lainnya. Intoleransi yang didasarkan atas dasar perbedaan agama dan keyakinan dalam buku ini disebut sebagai “intoleransi sosial-keagamaan”.
  - e) Komunitas sekolah. Individu atau kelompok yang berkepentingan dengan kesuksesan dan perkembangan sekolah. Mereka meliputi siswa, guru, orang tua siswa, asosiasi guru, institusi pemerintah di tingkat nasional, kabupaten/kota, atau provinsi, kelompok bisnis, organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan, dan media.
  - f) Partisipatif paradigma pendidikan menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mendorong partisipasi aktif seluruh pihak di lingkungan sekolah atau di kelas. Partisipasi juga menjadi modal dasar bagi pembentukan budaya damai. Peserta didik berhak mengusulkan atau mengajukan gagasan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berorientasi perdamaian dan toleransi. Semakin banyak ide, seharusnya semakin banyak strategi alternatif untuk memperkuat sekolah damai.
  - g) Kolaboratif. Kolaborasi berarti setiap aktor di lingkungan sekolah, apapun posisi dan perannya, bekerja sama untuk menciptakan budaya damai. Kolaboratif mensyaratkan kerendahan hati karena perlu menerima masukan dari mereka yang lebih muda, yang posisinya di bawah, yang dari luar sekolah.

Kolaborasi perlu memperhatikan masukannya daripada dari siapa masukan itu diperoleh. Masukan tersebut haruslah berorientasi pada penciptaan lingkungan sekolah dan ruang kelas yang berorientasi pada bina damai sesuai peraturan Perundang – undang dan kebijakan yang penting di perhatikan serta diterapkan sesuai Peraturan dan Undang – Undang yang termaktub dalam:

- 1) “Pasal 28C Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan UUD 1945” ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.\*\*). Selanjutnya,

Pasal 28E, (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.\*\*)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.\*\*)

#### 2) UU Sisdiknas, Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

#### Pasal 40

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. Menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### 3) Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 3. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab.

#### 4) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 2: (1) PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

#### 5) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

- a) Terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;

b) Terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan Untuk menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antara peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang dapat menjadi acuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan seimbang, termasuk aspek sosial dan kepribadian, prinsip-prinsip persatuan, keadilan, dan demokrasi.

Metode sekolah untuk pendidikan resolusi konflik sebelum mereka ditempatkan di sekolah-sekolah untuk melakukan praktek pengajaran pendidikan yang menyenangkan. Hal ini membantu untuk memastikan dukungan administrasi bagi guru baru yang mencoba untuk memperkenalkan pendidikan perdamaian.



**Gambar .3** Metode pendidikan resolusi konflik melalui Pendidikan Perdamaian Melalui Sekolah – Sekolah contoh Rujukan Model Sekolah Damai Untuk Indonesia

### 1) Solidaritas Camp

- a) Solidaritas *camp*' yang di adakan untuk pemuda sepanjang tahun di Rwanda bertujuan untuk mempertemukan orang-orang muda dari kelompok etnis yang berbeda dalam kegiatan pelayanan rekreasi dan masyarakat.
- b) Sedangkan 'Camps Perdamaian' di Lebanon difokuskan pada orang-orang muda dari kelompok etnis yang berbeda, dan melibatkan mereka dalam kegiatan rekreasi, pelatihan kejuruan, dan studi sejarah dan geografi negara.
- c) Camp sekolah musim panas di Mesir berfokus pada tema 'berurusan dengan perbedaan, dan telah membawa anak-anak dari kelompok sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda.
- d) Komite Nasional untuk UNICEF juga menyatukan anak dari kelompok budaya yang berbeda untuk camp musim panas yang berfokus pada membangun hubungan saling pengertian. Komite untuk UNICEF memiliki program serupa untuk anak-anak dari kelompok budaya yang berbeda.

### 2) Olahraga dan program rekreasi

Olahraga dan program rekreasi yang berfokus pada pembangunan tim kerjasama, sportivitas, dan keterampilan dalam pengambilan keputusan

merupakan bagian dari program pendidikan perdamaian percontohan di Burundi dan Rwanda.

### 3) Kelompok dan Klub Pemuda

Kelompok dan Klub Pemuda diantara pesertanya ditargetkan di Mesir program 'Values for Life'. Paket pelatihan telah dikembangkan untuk para pemimpin kelompok pemuda di Mesir, Lebanon dan Mozambik. Komite Korea untuk UNICEF sponsor after-school 'Global Village Klub' yang memperkenalkan orang muda untuk resolusi konflik dan hak-hak anak.

### 4) Pelatihan untuk menjadi pemimpin masyarakat

Pelatihan untuk menjadi pemimpin masyarakat telah dilakukan di camp-camp pengungsi pertama bagi pengungsi Rwanda dan kemudian pengungsi Burundi dan Kongo di Tanzania untuk orang-orang yang sering berada dalam peran perdamaian masyarakat, seperti tokoh agama, pekerja sosial, dan pemimpin politik. Sedangkan di Somalia telah mengembangkan pelatihan damai bagi kelompok perempuan.

### 5) Lokakarya untuk orang tua

Lokakarya untuk orang tua tentang pendidikan perdamaian telah diselenggarakan di Kroasia.

### 6) Pustakawan

Pustakawan telah direkrut di Kroasia untuk menerima pelatihan pendidikan untuk pembangunan, dan bagaimana menggunakan kegiatan perpustakaan untuk mempromosikan toleransi. Mereka juga memberikan workshop bagi orang tua tentang pendidikan untuk pengembangan dan toleransi.

### 7) Pelatihan Media

Pelatihan media adalah salah satu cara untuk mempengaruhi produsen media untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan konten damai melalui program radio dan televisi untuk anak-anak. Pelatihan media telah dilakukan di Sri Lanka dan direncanakan di Mesir. Mesir juga berencana untuk membuat sistem anti kekerasan pada televisi dan film, sehingga sekelompok 'media yang menonton' berpusat pada anak. Media pelatihan kesadaran untuk orang tua dan anak-anak mungkin menjadi salah satu cara untuk membantu mengurangi dampak dari pemrograman kekerasan media.

### 8) Saluran Komunikasi Lainnya.

Program UNICEF juga mempekerjakan saluran komunikasi lainnya untuk menjangkau anak-anak, remaja dan orang dewasa yang tidak disajikan oleh pelatihan, lokakarya dan program di sekolah-sekolah ataupun luar sekolah. Ada sejumlah inisiatif yang menggunakan metode komunikasi informal untuk mengatasi peningkatan kesadaran tentang isu-isu perdamaian dan konflik, membangun akar dukungan untuk proses damai resolusi konflik, dan mempromosikan perubahan perilaku.

- a) Majalah untuk orang-orang muda dengan fokus pada tema perdamaian telah berhasil digunakan di Sri Lanka

- b) Program teater telah digunakan di Burundi, Mozambik dan Rwanda. Liberia (1993) telah menggunakan seni, drama, lagu dan tari di Program Kukatonon, sehingga memungkinkan orang muda untuk mengekspresikan diri mereka dan melayani sebagai pendidik masyarakat.
- c) Wayang merupakan media yang ideal untuk membahas isu-isu sensitif. Boneka menarik penonton ke dalam drama tanpa menyebabkan mereka merasa terancam oleh tindakan dalam drama. Boneka telah digunakan dalam pendidikan perdamaian di Mozambik. Program wayang Workshop Televisi Anak Filipina, Batibot, adalah dirancang untuk memelihara perkembangan anak dan mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, non-kekerasan, dan bekerja sama untuk menangani masalah. Anak-anak pada Blok boneka rombongan termasuk ras beragam boneka dan boneka cacat untuk memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan kepekaan dan pemahaman terhadap orang lain. 'Kids on the Blok' melakukan pertunjukan di Amerika Serikat dan 25 negara lainnya.
- d) Televisi dan radio, Medsos telah digunakan di Burundi untuk meningkatkan publik kesadaran akan masalah perdamaian dan konflik. Sebuah inisiatif 'Radio untuk Pembangunan' telah dicoba di Mozambik.
- e) Animasi adalah media lain yang dapat membuat konsep yang kompleks tentang perdamaian dan konflik mudah diakses ke berbagai khalayak. Dewan Film Nasional Kanada telah berhasil digunakan film kartun animasi pada topik-topik seperti berurusan dengan perbedaan dan damai pemecahan masalah.
- f) Kampanye perdamaian dapat mengambil banyak bentuk, dan bisa menjadi cara yang ampuh untuk membuat dasar yang luas dukungan untuk perubahan sosial yang damai. Survei opini publik di proses perdamaian telah terjadi di Somalia. Di Kolombia, proyek 'Suara untuk Perdamaian' mengundang warga untuk mengekspresikan mandat untuk mengakhiri kekerasan. Anak-anak juga diundang untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang isu-isu perdamaian dan konflik. Di Tanzania, sebuah Minggu perdamaian, yang berpuncak pada Hari Perdamaian, diadakan di kamp-kamp pengungsi. Kegiatan lagu disertakan, tari dan puisi kompetisi pada tema perdamaian, dan masyarakat forum diskusi tentang isu-isu perdamaian. Inisiatif ini akan dilanjutkan pada tahunan dasar.
- g) Kontes dan pameran dapat membangun kesadaran tentang isu-isu perdamaian dan konflik. Rwanda dilakukan kontes nasional untuk mengembangkan logo 'pendidikan untuk perdamaian', dan kompetisi bermain - menulis nasional pada tema perdamaian dan toleransi. Liberia digunakan pameran lukisan anak-anak tentang efek konflik bersenjata untuk mendorong diskusi publik tentang perlunya perdamaian.

Burundi telah mengembangkan kalender yang menggambarkan hak-hak anak. Kolombia telah mengadakan kompetisi seni pada tema perdamaian sebagai hak.

- h) Revitalisasi mode tradisional perdamaian telah menarik terutama di sejumlah Timur dan Selatan negara-negara Afrika di mana upaya yang dilakukan untuk mendokumentasikan proses tradisional pembuatan perdamaian yang berada dalam bahaya yang telah hilang selama masa perubahan sosial yang cepat.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam penerapan sekolah damai diantaranya melalui 1) Pendidikan multikultural. Sekolah harus menerapkan pendidikan multikultural yang mengutamakan penghargaan terhadap keragaman budaya, bahasa, dan agama siswa. Hal ini dapat dicapai melalui kurikulum yang mencerminkan latar belakang budaya dan sejarah yang beragam dan melibatkan siswa dalam kegiatan yang meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya; 2) Penyelesaian sengketa dan mediasi: Sekolah dapat menggunakan resolusi konflik dan mediasi melalui program Schools of Peace. Pelatihan dapat ditawarkan kepada guru, siswa dan staf sekolah untuk mengembangkan keterampilan resolusi konflik yang efektif dan mendorong dialog konstruktif untuk menyelesaikan perselisihan; 3) Partisipasi siswa: Penting untuk melibatkan siswa dalam keputusan sekolah dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan perdamaian dan kerja sama. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan kelompok siswa atau dewan siswa yang bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai sekolah yang damai; 4) Pendidikan Guru: Pentingnya pelatihan bagi guru dalam metode pendidikan perdamaian dan mendapatkan pengetahuan tentang keragaman budaya, resolusi konflik dan keterampilan antar budaya. Pelatihan ini membantu mereka memfasilitasi dialog, mengelola konflik, dan mempromosikan pemahaman lintas budaya di kelas; 5) Kerjasama antara sekolah dan masyarakat: Penting untuk membangun hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Kerjasama antara sekolah, orang tua, tokoh masyarakat dan lembaga lainnya dapat memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang damai. Ini mungkin termasuk kegiatan komunitas yang mempromosikan kerja sama dan pemahaman, dialog antar kelompok atau program komunitas; 6) Perlindungan Anak: Sekolah harus memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang tinggal di daerah perbatasan. Ini termasuk kebijakan tanpa kekerasan dan anti-intimidasi yang ketat, serta langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari pelecehan, eksploitasi, atau diskriminasi.

Poin penting dalam implementasi Sekolah Damai: Harmonisasi Antara Kurikulum dan Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar" adalah sebagai berikut:

- 1) Pentingnya harmonisasi antara kurikulum dan profil pelajar Pancasila dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Konsep sekolah damai menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara kurikulum yang diterapkan di sekolah dengan nilai-nilai Pancasila yang melekat pada setiap pelajar. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan belajar kepada siswa, namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
- 2) Pembentukan karakter dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kurikulum. Konsep ini menekankan pentingnya pengembangan karakter dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, sekolah perlu menyertakan pembelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan kesetaraan.
- 3) Peningkatan interaksi dan kerjasama antara siswa. Konsep sekolah damai mendorong adanya interaksi yang baik antara siswa, di mana nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati, toleransi, dan kebersamaan dijunjung tinggi. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, penting bagi siswa untuk belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis.
- 4) Dampak positif implementasi Konsep Sekolah Damai. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif dalam lingkungan sekolah, seperti peningkatan disiplin siswa, peningkatan nilai akademik, pengembangan sikap empati dan kepedulian sosial, serta meningkatkan kualitas hubungan antara siswa, guru, dan orang tua.
- 5) Kontribusi terhadap pembentukan generasi yang berdaya saing dan berkepribadian unggul. Melalui harmonisasi antara kurikulum dan profil pelajar Pancasila, konsep sekolah damai dapat memberikan kontribusi penting dalam pembentukan generasi muda yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan moral yang seimbang. Dengan demikian, generasi ini dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.
- 6) Pengembangan keterampilan adaptasi dan pengertian konteks global. Di daerah perbatasan, siswa perlu mengembangkan keterampilan adaptasi dan pemahaman tentang konteks global yang melibatkan negara-negara tetangga. Konsep ini mempromosikan pembelajaran yang mendukung pemahaman akan keterkaitan global, diplomasi, dan perspektif internasional.
- 7) Menjaga keamanan dan perdamaian. Daerah perbatasan sering kali rentan terhadap konflik dan ketegangan. Konsep "Sekolah Damai" mendorong siswa untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di

lingkungan mereka melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, dialog antarbudaya, dan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kerjasama.

- 8) Membangun program kerjasama. Puncak belajar di School of Compassion adalah bekerja sama dengan sekolah lain. Dalam upaya membangun perdamaian dan memperkenalkan perbedaan, program ini dinamakan Cooperative Learning.
- 9) Berlatih disiplin tanpa ancaman hukuman. Mengembangkan aturan bersama: Melibatkan siswa dalam proses pengembangan aturan kelas atau sekolah dapat memberikan mereka rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap aturan tersebut. Dalam diskusi kelompok atau pertemuan kelas, siswa dapat berpartisipasi dalam menyusun aturan yang adil, relevan, dan berdasarkan nilai-nilai yang dihormati oleh semua. Hal ini juga membantu siswa memahami pentingnya aturan dan konsekuensi yang timbul dari melanggarnya.

Menerapkan pendidikan perdamaian dan anti *bullying*. Mengurangi perilaku *bullying* di sekolah. Hal ini melibatkan pemahaman tentang apa itu *bullying*, mengapa itu salah, dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan siswa. Siswa perlu diajarkan untuk mengenali tanda-tanda *bullying*, melaporkan insiden *bullying*, dan menjadi sekutu bagi siswa yang menjadi korban *bullying*. Selain itu, penting untuk mempromosikan budaya sekolah yang nol toleransi terhadap perilaku *bullying* dan melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *bullying*.

#### 4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, konsep "Sekolah Damai: Harmonisasi Antara Kurikulum dan Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar" menekankan pentingnya integrasi antara kurikulum dan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, mengembangkan karakter siswa, dan membentuk generasi muda yang berdaya saing dan berkepribadian unggul. Lingkungan sekolah harus membangun dan menciptakan lingkungan sekolah yang konsisten dengan nilai inti dan prinsip perdamaian, serta menilai dan mengatasi faktor intelektual dan struktural lokal yang mendorong tindak kekerasan di sekolah terus berlanjut. Pendekatan pendidikan perdamaian harus melampaui pengembangan kurikulum dan bertujuan untuk menginternalisasi keterampilan, kompetensi, nilai, dan praktik khusus baik di dalam maupun di luar kelas. Inisiatif dalam pendidikan perdamaian formal di sekolah harus dilengkapi dengan kerjasama yang sistematis dari seluruh staf sekolah

dan pemangku kepentingan lainnya sehingga guru dapat mendukung penuh penanaman nilai-nilai perdamaian pada siswanya. Sekolah di kelas harus menggabungkan pendekatan yang dipersonalisasi untuk pendidikan perdamaian dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dengan konsep menumbuhkan toleransi, membantu siswa memahami kontribusi yang mereka buat sendiri ke dalam dinamika konflik yang mereka hadapi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J.A.(1997) *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New York and London Teacher College Press.
- Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A., & Dumas, T. (2003) Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. *Journal of Educational Psychology*, 95(3), 570-588.
- Cavanagh, T. (2009). Creating a new discourse of peace in schools: Restorative justice in education. *Journal for Peace and Justice Studies, special issue on Restorative Justice*, 18(1-2), 62-84
- Cresswell, J. (2003). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Deutsch, M. (1993). *Educating for a peaceful world*. *American Psychologist*, 48, 510-517
- Faiz, A., & Soleh, B. (2021). Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 7(1), 68-77.  
<https://doi.org/10.22219/jinop.v7i1.14250>
- Johnson, D. W., & Johnson, R. (2005). Essential components of peace education. *Theory into Practice*, 44(4), 280-292.  
[https://doi.org/10.1207/s15430421tip4404\\_2](https://doi.org/10.1207/s15430421tip4404_2)
- Loukas, A., Suzuki, R., & Horton, K. D. (2006) Examining school connectedness as a mediator of school climate effects. *Journal of Research on Adolescence*, 16(3), 491-502.
- Maftuh, B. (2010). *Memperkuat Peran IPS dalam Membelajarkan Ketrampilan Sosial dan Resolusi Konflik*. Bandung: Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mushaiqri, M. R. A. , Ishak, Z. B. , & Ismail, W. M. (2021). *Effects of the Peace Education Program on the Social and Emotional Behaviour for Pre-School in the Sultanate of Oman*. In O. a. A. de la Rosa, L. M. V. Angulo, & C. Giambone (Eds.), *Education in Childhood*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.97795>
- Salomon, G. (2002). *The nature of peace education: Not all programs are created equal*. In: G. Salomon and B. Nevo (Eds.). *Peace Education, The Concept, Principles, and Practices Around the World* (pp. 2-14). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta., (April 2015), 31-46.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 567(1), 88-107.  
<file:///C:/Users/demet/Downloads/welshanna%202000.pdf>